



SEMNAS Pagi 2013

ISBN 978-979-95951-8-8

PROSIDING B
SIMPOSIUM PENELITIAN TERKINI PANGAN DAN GIZI
**BIDANG GIZI MASYARAKAT
DAN KEBIJAKAN PANGAN**

27 Juni 2013, Balai Kartini-Jakarta

Editor :
Dodik Briawan
Hardinsyah



Diterbitkan
PERGIZI PANGAN INDONESIA



INAS PAGI 2013

PROSIDING B
SIMPOSIUM PENELITIAN TERKINI PANGAN DAN GIZI
**BIDANG GIZI MASYARAKAT
DAN KEBIJAKAN PANGAN**

27 Juni 2013, Balai Kartini-Jakarta

Editor :
Dodik Briawan
Hardinsyah



Diterbitkan
PERGIZI PANGAN INDONESIA
2013

Prosiding B
Simposium Penelitian Terkini Pangan dan Gizi
Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan
Copyright © 2013, PERGIZI PANGAN Indonesia

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Penerbit PERGIZI PANGAN Indonesia, Desember 2013
Dicetak oleh : IPB Press

Editor : Dodik Briawan dan Hardinsyah
Desain Sampul : Ramona Jayana

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cara merujuk artikel dalam prosiding ini :

(Nama). 2013. (Judul Artikel). Dalam Briawan D dan Hardinsyah (eds). Prosiding B Simposium Penelitian Terkini Pangan dan Gizi Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan. Hlm ?-?. 27 Juni 2013. PERGIZI PANGAN Indonesia. Jakarta.

iv + 340 halaman.,
ISBN : 978-979-95951-8-8

RINGKASAN

Masalah gizi utama di Indonesia saat ini adalah stunting, sehingga analisis tentang faktor risiko stunting menjadi penting. Studi di puskesmas di Makassar menunjukkan faktor risiko stunting adalah kejadian berat bayi lahir rendah, kelengkapan imunisasi, dan rendahnya pendidikan ibu. Faktor risiko stunting lainnya dari studi di NTT adalah pendapatan keluarga, pola asuh ibu, dan asupan gizi anak. Anak dengan riwayat stunting mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan yang tidak stunting. Studi di puskesmas di Surabaya menunjukkan tidak terdapat hubungan antara beban kerja ibu dengan status gizi balita, apabila pekerjaan ibu tergolong tidak berat dan adanya pengasuh pengganti selama ibu bekerja. Pada kajian pendampingan 2500 anak balita gizi kurang dan stunting di Surabaya ternyata hanya menurunkan 1% gizi kurang dan 1.2% stunting. Masalah gizi mikro yang dijumpai pada anak balita adalah anemia. Kejadian anemia pada anak balita diantaranya karena persepsi ibu yang kurang tepat tentang anemia. Studi tentang anak jalanan di Kota Medan menunjukkan sebagian besar subjek mempunyai kadar hemoglobin dengan kategori rendah dan sangat rendah, sedangkan aktivitas anak jalanan dengan kategori berat

Review studi dilakukan untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan. Dari 11 jurnal yang direview disimpulkan bahwa dukungan yang lebih baik pada ibu, baik dari petugas maupun keluarga dapat berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi. Studi ibu hamil di NTT menunjukkan sebesar 71.4% tidak tahu tentang manfaat konsumsi Fe, sebanyak 1.4% belum pernah memeriksa kehamilan, sedangkan 15.7% memeriksa kehamilan namun tidak sesuai dengan anjuran. Terdapat 13% ibu mengatakan tidak pernah mengonsumsi Fe selama kehamilan.

Analisis terhadap faktor risiko kegemukan dilakukan pada kelompok wanita usia dewasa (19-55 tahun) menggunakan data Riskesdas 2010. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya mempromosikan aktivitas fisik dan diet yang sehat terutama menurunkan konsumsi makanan dan minuman manis dan konsumsi karbohidrat yang tidak berlebih untuk pencegahan dan pengendalian kegemukan. Studi di Kota Malang menunjukkan kombinasi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) adalah kebiasaan merokok setiap hari, konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 kali penyajian setiap hari, aktivitas fisik rendah, *overweight* ($IMT \geq 25 \text{ kg/m}^2$), tekanan darah sistolik ≥ 140 dan atau ≥ 90 mm Hg. Studi pada orang dewasa juga mengkonfirmasi bahwa sarapan merupakan faktor yang memengaruhi kejadian obesitas, yaitu subjek yang sarapan memiliki proteksi 2.4 kali untuk terhindar dari obesitas.

Analisis data Riskesdas 2010 pada wanita dewasa menunjukkan rata-rata konsumsi buah dan sayur wanita sebesar 139.7 ± 55.9 g yang jauh lebih rendah dibandingkan anjuran WHO 400 g/hari. Hanya 1.0% subjek yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran 250–400 g/hari dan 0.2% subjek mengonsumsi buah dan sayur di atas 400 g/hari. Konsumsi sayur lebih tinggi dibanding konsumsi buah. Tentang preferensi konsumsi sayuran, hasil penelitian di daerah Kampus Unesa (Semarang) menunjukkan 78.3% anak balita tidak menyukai sayur dan 60.6% tidak suka ikan, dan konsumsi sayur harian 23.9 g dan ikan 19.9 g. Rendahnya konsumsi ikan dikarenakan ibu jarang membeli ikan dengan alasan mahal harganya, susah pengolahannya dan berbau anyir. Dengan

intervensi terintegrasi (pendidikan gizi, pelatihan teknologi, dan penguatan media informasi) di Madura terdapat peningkatan konsumsi sayuran pada ibu hamil.

Studi tentang perilaku gizi seimbang remaja di Kota Medan menunjukkan perilaku yang rendah. Selain itu ditemukan sebanyak 12 indikator (putri) dan 16 (putra) indikator gizi seimbang. Studi anak di lembaga PAUD di Kota Bogor menunjukkan perkembangan anak lebih baik setelah dilakukan intervensi pendidikan gizi seimbang dan tumbuh kembang anak. Dalam pengembangan pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar dari studi di Bogor dan Jakarta disarankan media komik berwarna dengan karakter kartun yang tokohnya menyukai olahraga dan musik merupakan alternatif pilihan media pendidikan gizi yang paling efektif dan layak. Untuk kelompok anak usia sekolah menengah pertama, pemberian materi pendidikan gizi dapat diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Studi ketahanan pangan di Kabupaten Serang menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang tergabung dengan organisasi atau kelembagaan pangan local, akan mengurangi peluang kerawanan pangan. Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa dalam ketahanan pangan rumahtangga perempuan berperan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (lingkungan sekitar) dan sumber daya manusia (pengetahuan lokal dan ketrampilan) untuk konsumsi pangan keluarga. Studi di Kabupaten Klaten dihasilkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas (misalnya lumbung paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, melainkan dikembangkan pada kegiatan yang sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan pangan lokalnya sudah pudar atau bahkan punah, maka perlu dibangun lagi.

Evaluasi Program DMP (Desa Mandiri Pangan) di 10 desa di 6 kabupaten menunjukkan bahwa pengaruh langsung kinerja fasilitator terhadap konsumsi pangan rumah tangga lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui variabel pengusaha lahan pekarangan dan pelatihan budidaya. Studi kasus tentang kebijakan *One Day No Rice* (ODNR) di Kota Depok dilakukan dengan subjek 181 PNS dari eselon 2, 3, dan 4. Sebanyak 90% pejabat tersebut mendukung kebijakan ODNR, namun dalam keseharian hanya 44% yang dapat menerapkan untuk tidak mengkonsumsi beras.

KATA PENGANTAR

Penerbitan Prosiding B, Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan merupakan salah satu dari tiga prosiding Simposium Nasional Pangan dan Gizi yang dirancang khusus untuk mempublikasikan 29 artikel hasil penelitian terkini di bidang pangan dan gizi dari 85 peneliti. Semua hasil penelitian ini dipresentasikan dan didiskusikan pada Simposium Nasional Pangan dan Gizi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013 di Balai Kartini, Jakarta.

Tema Simposium Nasional Pangan dan Gizi adalah inovasi Pangan dan Gizi Mewujudkan Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Simposium ini diselenggarakan oleh PERGIZI PANGAN Indonesia bekerjasama dengan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), PDGMI (Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia), PDGKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia), ISAGI (Ikatan Sarjana Gizi Indonesia), dan GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia).

Kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis, mitra pelaksana dan semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan Simposium Nasional Pangan dan Gizi dan penerbitan Prosiding Bidang Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan ini.

Selamat membaca, semoga memberi inspirasi baru dan menambah wawasan tentang berbagai inovasi atau penelitian tentang gizi dalam arti luas.

Redaksi

DAFTAR ISI

Ringkasan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. Masalah dan Determinan/Hubungan Gizi dan Kesehatan	
1. Faktor Risiko <i>Stunting</i> pada Anak Balita 12—59 Bulan di Wilayah Puskesmas Tamamaung Makassar <i>Asry Dwi Muqni, Veni Hadju, Nurhaedar Jafar</i>	1
2. Analisis Determinan dan Pengaruh <i>Stunting</i> Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah di Kupang Dan Sumba Timur, NTT <i>Intje Picauly dan Sarcy M. Toi</i>	11
3. Beban Kerja dan Stres Ibu Bekerja, Kaitannya dengan Status Gizi Balita <i>Fita Diana Puspita dan Lailatul Muniroh</i>	23
4. Penurunan Balita Kurus dan Pendek dengan Program Mitra Gizi (Pendampingan Keluarga) Balita di Kota Surabaya <i>Andriyanto, Annas Buanasita, Luki Mundiastuti, Kartika, Dhenok Widari</i>	33
5. Aspek Gizi dan Kesehatan Santri yang Memiliki dan Tidak Memiliki Poskestren <i>Lailatul Muniroh dan Muji Sulistyowati</i>	47
6. Perbedaan Persepsi dan Asupan Protein dan Zat Besi Pada Anak Anemia dan Non-Anemia Umur 1—3 Tahun di Kota Surakarta <i>Yanti Ernalia, Hamam Hadi, Retna Siwi Padmawati</i>	59
7. Hubungan Antara Status GAKY dan Status Anemia dengan Kesegaran Jasmani pada Anak Sekolah Dasar di Daerah Endemik GAKY <i>Yhona Paratmanitya, Toto Sudargo, Nur Hidayat</i>	71
8. Hubungan Kebiasaan Makan dengan Kadar Glukosa dan Hemoglobin Darah Serta Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Anak Jalanan di Kota Medan <i>Ginta Siahaan, Fauzi Romeli dan Oslida Martony</i>	83
9. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Besi - Folat Selama Kehamilan <i>Wiradnyani LAW, Khusun H dan Achadi EA</i>	99
10. Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia <i>Rian Diana, Indah Yuliana, Ghaida Yasmin, Hardinsyah</i>	113

1. Analisis Kesehatan Istri pada Rumah Tangga Sangat Miskin dalam Kerangka Acuan Program Keluarga Harapan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur <i>A. Iskandar</i>	123
2. Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Hubungan Dengan Skor Kualitas Diet dan Status Sosial Ekonomi <i>Nurul Muslihah, AS Zakaria dan Wulandary</i>	133
II. Intervensi atau Pengaruh Gizi dan Kesehatan	
3. Kemampuan Ibu Bekerja Memberikan Asupan Makanan Anak 6—59 Bulan Sesuai Konsep Keberagaman Jenis dan Faktor yang Berhubungan: Analisis Data SDKI 2007 <i>Aria Kekalih, Judhiastuty Februhartanty, Anuraj Shankar</i>	143
4. Kualitas Diet dan Hubungan dengan Pengetahuan Gizi, Status Gizi, dan Status Sosial Ekonomi <i>Nurul Muslihah, Sri Winarsih, Soemardini, AS Zakaria dan Zainudiin</i>	153
5. Analisis Konsumsi Buah dan Sayur pada Wanita Indonesia <i>Zaini Muharram dan Hardinsyah</i>	163
6. Konsumsi Sayuran dan Ikan Terhadap Status Gizi dan Kesehatan Anak Balita di Wilayah Lingkar Kampus Unnes Gunungpati Semarang <i>Sus Widayani</i>	173
7. Analisis Perilaku Gizi Seimbang pada Remaja Berbasis Gender <i>Esi Emilia dan Meuthia Fadila</i>	189
8. Pengaruh Intervensi Terintegrasi dalam Meningkatkan Konsumsi Sayuran bagi Ibu Hamil Etnis Madura <i>Annis Catur Adi, Triska Susila N., Pulung Siswantara, Setya Pranata, Edy Herry P.</i>	197
9. Pengaruh Intervensi Pendidikan Gizi Seimbang dan Tumbuh Kembang terhadap Kualitas Anak Usia Dini di Kota Bogor <i>Evy Damayanthi, Lilik Kustiyah, Cesilia M. Dwiriani dan Neti Hernawati</i>	209
10. Kebiasaan Sarapan sebagai Faktor Protektif Obesitas pada Orang Dewasa <i>Andi Imam Arundhana, A Razak Thaha dan Nurhaedar Jafar</i>	221
11. Aktivitas, Media, dan Karakter Tokoh Favorit dalam Pengembangan Pendidikan Gizi bagi Anak Sekolah <i>Hardinsyah, Muhammad Aries, Cesilia Meti Dwiriani, Faika Dwiyantri dan Cyndy Au</i>	229

III. Perbaikan dan Kebijakan dll	
22. Pengembangan Model Pendidikan Gizi untuk Mencegah Timbulnya Masalah Gizi pada Remaja yang Berintegrasi dengan Kegiatan Sekolah <i>Ai Nurhayati, Tati Setiawati dan Cica Yulia</i>	237
23. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Watubonang dan Dayakan Kec. Badegan Kab. Ponorogo sebagai Upaya Penanggulangan GAKY Berbasis Budaya <i>Lilik Rosidah, Agus Hartono dan Laili Rahmawati</i>	247
24. Kuasa Pengetahuan Ketahanan Pangan dan Pembentukan Ketahanan Pangan Rumahtangga di Kabupaten Serang, Banten Indonesia <i>Titik Sumarti dan Mahmudi Sivi</i>	257
25. Peran Perempuan dalam Pemenuhan Konsumsi Pangan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal untuk Mencapai Ketahanan Pangan Keluarga di Pedesaan <i>Yunindyawati, Titik Sumarti, Soeryo Adiwibowo, Aida Vitayala, Hardinsyah</i>	283
26. Kajian Program Pemberdayaan Petani pada Komunitas Rawan Pangan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Indonesia: Tinjauan Sosiologi Kelembagaan <i>Siti Masithoh, Titik Sumarti, Tri Pranadji</i>	295
27. Pengaruh Kinerja Fasilitator Terhadap Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Lampung <i>Wuryaningsih Dwi Sayekti dan Rabiatal Adawiyah</i>	307
28. Pendapat dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Depok terhadap Kebijakan Walikota tentang Gerakan <i>One Day No Rice</i> <i>Guspri Devi Artanti dan Vera Nelasari</i>	315
29. Dinamika Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat di Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Tebu (Kasus Di Kabupaten Malang dan Lumajang) <i>Tri Bastuti Purwantini</i>	325
30. Pola Konsumsi Pangan Hewani Remaja Indonesia <i>Trikorian Adesanjaya dan Hardinsyah</i>	341
Diskusi Simposium Penelitian Terkini Pangan dan Gizi Bidan Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan	349

**KAJIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI PADA KOMUNITAS RAWAN PANGAN DI
KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH INDONESIA: TINJAUAN SOSIOLOGI KELEMBAGAAN**
(*Study in Farming Community Empowerment Program in Food insecurity area of Klaten District
Central Java Indonesia: Institutional Sociology Review*)

Siti Masithoh¹, Titik Sumarti^{1*}, Tri Pranadji¹

¹Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) – IPB,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program pemberdayaan petani pada komunitas desa rawan pangan melalui tinjauan sosiologi kelembagaan. Penelitian dilakukan di dua desa rawan pangan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif) dengan studi kasus kelompok petani yang mendapat program desa mandiri pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program desa mandiri pangan belum mampu memberdayakan rumah tangga petani miskin pada desa rawan pangan melalui kelompok-kelompok afinitas dan kelembagaan lokal, (2) Kelembagaan ketahanan pangan yang dibangun dengan basis kelembagaan asli (lokal), nilai solidaritas, kepercayaan (*trust*) pada pimpinan, serta dukungan pendampingan dan Peyuluh Pertanian Lapang yang kompeten dalam melihat kebutuhan dan konteks lokal, terbukti mampu menjadi kekuatan pengembangan ketahanan pangan komunitas. Kegiatan pemberdayaan seyogyanya difokuskan pada pemberdayaan rumah tangga petani dengan dukungan kelembagaan ketahanan pangan yang kuat, baik itu di level komunitas, desa dan kabupaten. Kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas (Lumbung Paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, melainkan dikembangkan pada kegiatan yang sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan pangan lokalnya sudah pudar atau bahkan punah, maka perlu dibangun lagi. Hal ini sangat penting, karena lumbung paceklik selain berfungsi sebagai “benteng utama” masyarakat dalam menghadapi masalah paceklik/kerawanan pangan, juga sebagai “ciri/perlambang” dari tegaknya kedaulatan dan solidaritas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani di pedesaan.

Kata kunci: kelembagaan lokal, ketahanan pangan, pemberdayaan petani

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan rumah tangga petani di pedesaan adalah melalui program Aksi Mandiri Pangan (Mapan) dengan sasaran wilayah adalah desa rawan pangan dan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2006, salah satunya di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Program mapan berpotensi menjadi kelembagaan yang bisa mempertemukan kepentingan rumah tangga miskin dengan pihak supradesa.

Program Mapan, seperti halnya program pengentasan kemiskinan yang sudah digulirkan oleh pemerintah seperti KUT, IDT, Raskin, BLT dan lain-lain secara empiris terbukti tidak efektif dan dalam banyak kasus menemui kegagalan serta tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana dan penerima program tersebut. Dilihat dari sisi kelembagaan, seringkali program yang masuk ke pedesaan memunculkan terbentuknya kelembagaan baru, sebagai salah satu instrumen syarat pelaksanaan program, dan

*Penulis korespondensi : titiksumarti61@gmail.com



seringkali kelembagaan baru tersebut tidak bersinergi dengan kelembagaan yang sudah ada di pedesaan.

Kebijakan pembangunan di bidang ketahanan pangan seyogyanya dapat mempertemukan dan mengharmoniskan antara aparat kepentingan pemerintah dengan kepentingan rumah tangga petani. Agar kedua kepentingan tersebut dapat bertemu dan harmonis, maka harus ada kelembagaan yang menyediakan ruang yang luas untuk mendialogkan dua kepentingan tersebut. Dalam pengertian, baik mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan hingga tahap evaluasi, seluruh pihak yang terlibat, terutama kepentingan petani gurem di akomodir secara aktif dan intensif di dalamnya. Program aksi mandiri pangan (Mapan) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan rumah tangga petani dan kerawanan pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal pedesaan, hadir dengan bentuk dan model baru.

Program Mapan adalah suatu kegiatan strategis yang menjadi andalan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah pedesaan, dimana perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil (pedesaan) sebagai basis kegiatan pertanian dimana rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program. Secara aturan, langkah-langkah pelaksanaan program ini bisa dikatakan sudah bercirikan memberdayakan rumah tangga petani miskin di pedesaan.

Pada dasarnya, program yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk Program Mapan, sebagai salah satu bentuk pembangunan pertanian, khususnya program ketahanan pangan, akan dapat diwujudkan jika secara ideal bersendikan pada "kemandirian" dan "keberpihakan" pada petani. Hal ini akan membawa konsekuensi pada perubahan kelembagaan pelayanan publik pertanian, yang mengarah pada upaya pemberdayaan petani melalui penguatan kapasitas diri petani, pengembangan jaringan kerjasama dan kelembagaan lokal. Kelembagaan asli (lokal) saat ini cenderung melemah, dan bahkan hancur karena digerus oleh pendekatan pembangunan masa lalu yang berciri terpusat dan mendominasi

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian ini mengenai bagaimana keberpihakan terhadap kepentingan rumahtangga petani miskin dalam pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal untuk mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan di pedesaan. Lokasi penelitian ini adalah Desa rawan pangan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Jambakan Kecamatan Bayat.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 1)Mengkaji pelaksanaan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal untuk mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan, 2)Menganalisis pengaruh berbagai kepentingan (ekonomi, sosial, politik) aktor dalam program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan lokal, 3) Mengkaji sejauh mana kepentingan rumah tangga petani miskin dijadikan dasar untuk mengevaluasi pencapaian program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan lokal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif) dengan strategi penelitian yang dipilih adalah

studi kasus dan bersifat multi metode yang diharapkan dapat memperkaya data dan memahami fenomena sosial yang sedang diteliti.

Penelitian dilakukan di desa rawan pangan, yaitu Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah dimana masyarakat atau rumah tangga dengan tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Desa Bayat dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua pertimbangan bahwa; *pertama*, lokasi ini adalah salah satu dari 100 kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah rawan pangan tahun 2006. *Kedua*, di desa Jambakan adalah salah satu desa pemangku program mandiri pangan dari pemerintah pusat. Waktu dilaksanakan penelitian adalah pada akhir Juni-Agustus 2008. Prosedur pengumpulan data dan strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tabel 1. Cara pengumpulan data

Kegiatan	Sumber data	Teknik Pengumpulan data
Mengkaji pelaksanaan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal untuk mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan	Data primer dan didukung data sekunder dari: pemerintah kabupaten, swasta dan komunitas desa	Wawancara dengan kuesioner, wawancara mendalam dan studi riwayat hidup
Menganalisis pengaruh berbagai kepentingan (ekonomi, sosial, politik) aktor dalam program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan lokal	Data primer dan didukung data sekunder dari institusi ketahanan pangan lokal yang dikelola pemerintah, swasta, dan komunitas desa (kasus)	Wawancara mendalam dengan anggota dan pengurus kelompok afinitas serta pengamatan berperan serta (partisipatif)
Mengkaji sejauh mana kepentingan rumah tangga petani miskin dijadikan dasar untuk mengevaluasi pencapaian program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan lokal	Kepala seksi Ketahanan pangan Kabupaten, instansi terkait, pengurus kelompok afinitas	Wawancara mendalam dan FGD (<i>Focus Group discussion</i>) dengan pihak stakeholder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sosial Kemiskinan Pedesaan

Sebagian besar (63.4%) mata pencaharian penduduk Desa Jambakan adalah petani berstatus sebagai buruh tani atau penggarap dengan rata-rata kepemilikan lahan sangat sempit (kurang dari 0.5 ha). Jenis tanah tandus dengan ketinggian tempat antara 200–300 dpl, curah hujan 1 025 mm/th, suhu udara rata-rata 36° C dan tidak ada sistem irigasi sehingga pertaniannya tadah hujan (padi setahun sekali dan selalu gagal panen). Oleh karena itu pertanian di Desa Jambakan tidak bisa diandalkan dan petani tidak menggantungkan hidupnya pada pertanian semata. Selain bertani, juga banyak yang berternak dan usaha ini sangat didukung dengan ketersediaan lahan tegalan yang menyediakan sumber pakan bagi ternak peliharaan para petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, sebagian besar petani gurem di Desa Jambakan menerapkan pola strategi nafkah ganda.

Kepala rumah tangga (laki-laki) memiliki nafkah ganda dengan berusaha membuka warung angkringan (dapat diperoleh pendapatan Rp 75 000-Rp 100 000,- per minggu) dan menjadi buruh bangunan di kota sekitar Klaten (pendapatan buruh bangunan berkisar antara Rp 35 000,- hingga Rp 50 000,-per hari). Usaha warung nasi angkringan pada dasarnya tidaklah memberikan keuntungan yang besar. Pekerjaan sampingan ini dijalankan semata-mata sekedar untuk mempertahankan keberlangsungan hidup anggota rumahtangga para petani gurem. Sedangkan kaum perempuan (isteri) bekerja usaha tenun dan warung yang dilakukan sepanjang musim (kemarau dan penghujan).

Hal ini dimungkinkan karena di Desa Jambakan sudah berkembang industri rumahtangga berupa konveksi dengan mekanisme kerja *putting out system*. Hampir dalam setiap rumahtangga, kaum perempuan usia dewasa mengerjakan tenun. Hasil tenun dijual kepada *bakul* keliling dengan harga Rp 7 000,- hingga Rp 8 000,- untuk satu *gendok* (dua selendang). Pendapatan yang diterima dari hasil menenun sekitar Rp 600 ribu – Rp 700 ribu-an per bulan. Apabila bekerja sebagai *buruh tenun* di tempat orang memperoleh pendapatan ±Rp. 45 000 per orang per tiga hari dengan jam kerja dari pukul 08.00-16.00. Tenun Jambakan semakin berkembang dengan munculnya beberapa tempat wisata di Kecamatan Bayat diantaranya makam Sunan Bayat, tempat pemancingan Rowo Jombor, sentra industri keramik Pager Jurang, sentra indutri batik keris dan lain-lain. Hal ini juga mendorong berkembangnya sektor dagang dan jasa (warung, toko, pasar, dan penginapan).

Kegiatan gotong-royong di Desa Jambakan masih bisa ditemui pada waktu tertentu. Gotong-royong dimaknai sebagai kebiasaan saling membantu antara masyarakat secara ikhlas tanpa digaji dan dipaksa. Jenis kegiatan tersebut diantaranya adalah pada saat membangun jalan kampung, ketika ada tetangga yang *ngedek-ne* rumah (memasang kerangka rumah), kerja bhakti bersih desa, *nyadaran* awal puasa, membantu pesta pernikahan (*sinoman*), *kesripahan* (ada tetangga yang meninggal), sunatan dan perayaan adat yang lain. Kegiatan tersebut dilakukan berupa tenaga untuk membantu secara langsung maupun juga membantu dari sisi materi. Menurut salah seorang *sesepuh* desa Jambakan (Mbah Hadi, yang pernah mengalami 7x pergantian kepala desa), pada masa lalu masyarakat membangun apa saja dengan gotong-royong.

Masih kuat dalam ingatan beliau, banyak proyek pembangunan masuk ke Jambakan seperti membangun SD Inpres, memindahkan rumah *gedhek* (rumah bilik non-permanen), dan sebagainya. Kegiatan proyek tersebut dilaksanakan dengan gotong-royong. Tetapi pada saat ini, pengerjaan proyek pembangunan tidak mungkin dijalankan dengan gotong-royong, karena anggaran proyek pembangunan tidak transparan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beliau diketahui bahwa desa memiliki saldo yang dikelola bersama di lingkungan tingkat RW dengan mekanisme kegiatan simpan pinjam. Di desa Jambakan, aktivitas menyumbang besar adalah sebuah prestise. Misalnya ada iuran menggalang dana warga untuk perbaikan sarana prasarana desa, maka warga masyarakat yang mampu akan berlomba-lomba menyumbang. Hal ini juga dipicu ketika terjadi bencana gempa dimana desa Jambakan juga termasuk salah satu desa yang parah kerusakannya, sehingga pada saat itu solidaritas untuk saling membantu sesama semakin muncul hingga saat ini. Misalnya pernah digalang secara swadaya iuran perbaikan jalan sebesar dua *sak* semen yang rumahnya di pinggir jalan dan satu *sak* yang rumahnya tidak di pinggir jalan. Realitas ini menunjukkan bahwa telah mudarnya modal sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan tindakan sosial yang dilakukan lebih pada berorientasi pada *status*.

Kelembagaan Ketahanan Pangan Lokal dan Kepentingan Rumah Tangga Petani Miskin.

Dalam suatu masyarakat, termasuk juga masyarakat pedesaan, kemajuan perekonomiannya, banyak ditentukan oleh sistem kelembagaan yang dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Masyarakat di Desa Jambakan, dan beberapa desa disekitarnya di Kecamatan Bayat kabupaten Klaten adalah desa-desa yang terkena dampak langsung bencana gempa, dalam menggiatkan kembali kehidupan perekonomiannya masih sangat mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah maupun swasta. Bantuan modal dari pemerintah baik yang bersifat hibah maupun yang bersifat bergulir yang berorientasi pada peningkatan skala usaha dalam rangka turut memberdayakan masyarakat tidak berdaya disekitarnya, pada dasarnya akan dan telah menimbulkan ketergantungan masyarakat desa. Oleh karena itu, jika sistem kelembagaan lokal dalam suatu masyarakat dibiarkan lemah, maka tidak ada peluang bagi mereka-mereka yang tidak berdaya di pedesaan untuk memajukan perekonomiannya. Dan sebaliknya, apabila diciptakan kelembagaan baru dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta, apapun bentuk kelembagaannya, jika upaya pengembangannya tidak sesuai dengan tatanan dan diterima masyarakat setempat maka hanya akan menimbulkan kesia-siaan dalam memajukan perekonomian di desa rawan pangan.

Kelembagaan pangan lokal yang ada di masyarakat desa Jambakan adalah kelembagaan yang mengatur berbagai aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat menuju kondisi ketahanan pangan baik di aspek produksi, konsumsi dan distribusi, yaitu diantaranya arisan sembako, arisan bahan bangunan, warung kelontong, beras jimpitan, tenun lurik, warung angkriangan, gaduhan ternak, maro sawah, simpan pinjam, pengajian, kelompok *sinoman*, lumbung, paguyuban Jamvatro dan karawitan.

Hubungan dan transaksi ekonomi rumahtangga miskin didasarkan pada modal kepercayaan dan sudah terbiasa meminjam atau memakai dulu segala sesuatu penunjang kegiatan dan akan dibayarkan atau dikembalikan ketika panen tiba atau ketika sudah punya kemampuan untuk membayar. Terkait dengan lumbung pengajian, terdapat kelembagaan Lumbung yang juga dikelola

oleh ibu-ibu pengajian Aisyiah di Desa Jambakan, tepatnya di dukuh Geneng. Lumbung Desa ini awalnya berdiri pada tahun 1993 atas ide Bapak Subagya untuk mengatasi paceklik atau puso, melalui pengumpulan zakat dari hasil panen atau *derep* yang tidak ditentukan batasnya. Zakat yang terkumpul disimpan di Masjid dan nantinya dapat digunakan saat musim paceklik atau *puso* dengan sistem pinjaman walaupun masih terbatas baru untuk masyarakat dukuh Geneng saja. Dalam perjalanannya, lumbung ini sempat terhenti sekitar tahun 1995-1996. Pada tahun 1997 lumbung ini kemudian dilanjutkan lagi tetapi oleh ibu-ibu kelompok pengajian Aisyiah. Gabah kering yang telah terkumpul kemudian di simpan di rumah salah seorang pengurus. Hingga saat ini telah terkumpul sekitar 2.175 kilogram dan belum dipinjamkan. Lumbung Desa ini juga menerima infak berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli karung atau *bagor*. Relitas sosial yang terjadi di Desa Jambakan menunjukkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal dapat mengakomodir kepentingan rumah tangga petani miskin dalam hal jaminan pangan (basis pada produksi dan konsumsi).

Kelembagaan Ketahanan Pangan Intervensi Pemerintah (Mapan) dan Dinamika Kepentingan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lahan pertanian yang kering dengan pengairan tadah hujan di Desa Jambakan telah menjadi permasalahan utama bagi upaya pengembangan produktivitas pertanian dalam mendukung ketahanan pangan rumahtangga petani. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masih didominasi oleh tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan ketahanan pangan anggota rumah tangganya. Jadi, tujuan pengelolaan ketahanan pangan di Desa Jambakan cenderung pada upaya peningkatan daya beli masyarakat. Fokus kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di desa Jambakan yang dimulai tahun 2006 adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dana bergulir melalui 4 tahap (persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian). Ciri kondisi kerawanan pangan Desa Jambakan diuraikan dalam Tabel 2.

PEMETAAN SOSIAL KEMISKINAN PEDESAAN

Ciri Rawan Pangan Desa Jambakan

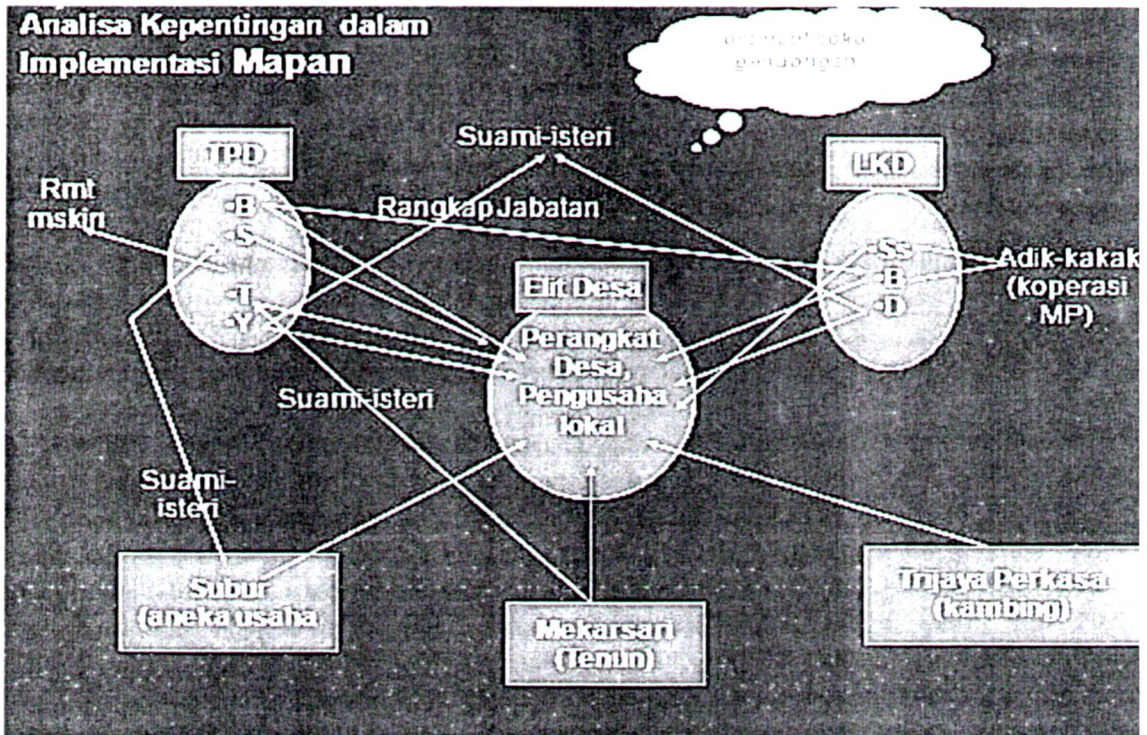
Mengonsumsi Beras sebagai Makanan Pokok	100%
Mengandalkan Produksi Sendiri dalam Memperoleh Makanan	86.7%
Mempunyai Persediaan Makanan dalam Seminggu ke depan	46.6%
Mengalami Kekurangan Makanan dalam 3 bulan ini	53.4%
Tidak pernah mengonsumsi makanan secara lengkap 4 sehat 5 sempurna dalam satu bulan ini	88.3%
Tidak pernah berhubunga dengan Bank	86.7%
Tidak mempunyai kebiasaan menabung	60.5%
Tidak pernah mendapat bantuan/modal dari pemerintah	75%

Dalam program Mapan dibentuk kelompok afinitas (Mekarsari, Tri Jaya Perkasa, Subur) serta kelembagaan pendukungnya (Pendamping, Tim pangan desa, Lembaga Keuangan Desa). Mekarsari adalah kelompok usaha tenun beranggotakan 25 orang dan mengelola dana Mapan sebesar Rp.30 250 000,-. Sebelum ada Mapan kelompok tenun sudah berkembang. Kelompok Trijaya Perkasa mengembangkan usaha ternak kambing, beranggotakan 15 orang dan mengelola dana mapan sebesar Rp.24 750 00,-(partisipasi pengurus kelompok lemah dan terbangun nilai dalam kelompok ini bahwa mapan adalah dana *hibah*. Selanjutnya kelompok Subur adalah kelompok aneka usaha (angkringan, dagang/warung, penjahit, buruh tani) yang beranggotakan 20 orang dan mengelola dana mapan sebesar Rp.25 000 000,-. Ada pengurus kelompok ini yang juga sebagai pengurus lumbung pengajian tetapi tidak ada keterkaitan antara lumbung pengajian dengan Mapan.

Pada tahap persiapan, pemilihan pengurus dan anggota kelompok afinitas berdasar penunjukan sehingga tidak semua anggota adalah rumah tangga miskin, pengelolaan dana berorientasi target proyek sehingga nilai yang dibangun adalah "dana sebagai *charity/ hibah*". Pada tahap penumbuhan, proposal tidak sesuai dengan penggunaan, tidak ada kontrol kuat dan ada pemotongan dana dari atas desa. Sampai pada tahap ketiga (pengembangan), kelompok Subur relatif berjalan lancar. Dikarenakan *mandulnya* pengurus, kelompok trijaya perkasa melaporkan ternak mati semua dan berpotensi macet. Sedangkan kelompok mekarsari (tenun) sudah berkembang tetapi secara normatif dianggap melanggar aturan karena menggulirkan dana kepada anggota baru tanpa melalui LKD. Kegiatan pendampingan tidak berjalan optimal, terutama karena tidak ada pendamping teknis (juga tidak melibatkan penyuluh pertanian). Kontrol dari pendamping tidak intensif karena tidak tinggal di desa (walaupun disediakan *living cost* dari program), serta kompetensi pendamping dalam hal teknis lemah (terutama dirasakan oleh kelompok ternak kambing). Kondisi ini menunjukkan ego-sektoral antar instansi pemerintah terkait (subdin peternakan, misalnya).

Dalam proses pembentukan Tim Pangan Desa didasarkan atas penunjukan dari Kepala Desa dan belum berjalan secara efektif bahkan bisa dikatakan belum berfungsi walaupun sudah beberapa kali diberikan pelatihan baik di kabupaten maupun di tingkat propinsi. Konflik internal yang terjadi pasca pilkades harus diakui sangat mempengaruhi jalannya komunikasi antar sesama anggota TPD. Selain itu, dikarenakan proses pembentukannya adalah penunjukan langsung sehingga ada anggota TPD yang anggota keluarganya tercatat juga sebagai penerima bantuan sekaligus sebagai anggota LKD. Selain itu juga harus diakui disebabkan oleh tidak adanya kepastian tentang insentif yang diperuntukkan bagi anggota TPD.

Kemampuan kelembagaan keuangan desa Jambakan untuk mengawal dan menjaga *dana arisan tingkat RT sangat bagus, tetapi ketika* mengelola dana yang datang dari luar desa, misalnya dana program mapan, justru sebaliknya. LKD mapan yang berfungsi untuk menggulirkan dana bantuan mapan, pada tahun keempat setelah semua anggota mengembalikan dana pinjaman dalam kelompok tidak berfungsi bahkan cenderung *bermasalah*. Dasar pembentukan LKD adalah pertimbangan *kepraktisan* dengan menunjuk koperasi MP yang sebelumnya sudah ada. Sampai pada tahun ketiga di tahap pengembangan, pada kenyataannya LKD bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Integrasi pihak-pihak yang terlibat dalam Program dan Tingkat Keterlibatannya dalam memberdayakan kelompok afinitas dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Analisa kepentingan aktor dalam program Mapan di Desa Jambakan

Pelaksanaan program mapan di Desa Jambakan masih pada **level peningkatan kapasitas petani dalam hal modal**, belum menyentuh pada pemberdayaan kelembagaan. Dari hasil FGD diketahui bahwa aspek-aspek teknis yang masih sangat dibutuhkan adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, ketersediaan pendampingan yang berkompeten dan mempunyai komitmen tinggi karena keragaman penyuluh saat sekarang bisa jadi berbeda, keterlibatan tenaga teknis lintas dinas terkait spesifikasi kegiatan program, dan ketersediaan tokoh lokal yang bisa mendorong dan menginspirasi petani. Selain itu perlu juga ada kognisi antar kelompok-kelompok tani yang membuka peluang dari otonomi daerah untuk membuat kebijakan program yang paling sesuai. Misalnya tentang adanya peraturan desa atau undang-undang desa yang mengatur pengelolaan berbagai instrumen pemberdayaan yang masuk ke desa. Menurut penjelasan dari perwakilan pengurus KTNA kecamatan Bayat bahwa memang wilayah Bayat adalah daerah yang paling kritis. Kendala petani adalah dari pupuk, kesulitan mendapatkan pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pelaksanaan program mapan belum memberdayakan kelembagaan ketahanan pangan lokal sehingga menyebabkan pengelolaan fiktif dan dikuasai oleh orang-orang tertentu** yang menguasai faktor produksi dan akses. Kondisi demikian dalam pelaksanaan suatu program akan berdampak dan berpotensi macet.

Hal tersebut diatas dipengaruhi karena **belum efektifnya peran pendamping, TPD dan LKD**. Sebagai konsekuensinya secara politik, sebagai pelaksana program (petani gurem) kepentingan **rumah tangga miskin belum terakomodir dalam program mapan dan masih menjadi obyek**

pembangunan. Setelah bencana gempa, banyak bantuan masuk ke desa Jambakan, namun sayangnya justru menyebabkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari program tersebut menjadi tidak optimal karena pendekatan pada hampir semua program tidak melihat pada ketersesuaiannya dengan kebutuhan lokal. Dan pada akhirnya baru pada level meningkatkan pendapatan, walaupun hanya pada rentang waktu sesaat, dan belum pada peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan lumbung pangan yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian di Dukuh Geneng, Desa Jambakan menunjukkan bahwa pemberdayaan bisa dilakukan pada tingkat komunitas. Didasarkan pada pemahaman keagamaan yang kuat tentang hakekat *sedekah* dan pengelolaannya yang *syar'i*, kegiatan lumbung disini mampu menjadi *penjamin* kebutuhan pangan komunitas, terutama pada musim *puso*. Pemberdayaan pada tingkat komunitas ini dapat berlangsung karena kuatnya modal sosial. Proses penguatan dalam pengelolaan lumbung ini tidaklah sebentar dan tidak juga mudah. Pada tahap awal penguatan pengurus lumbung yang juga pengurus pengajian bahkan sangat kurang mendapat dukungan dan pada awalnya bahkan juga ditentang aparat pemerintahan desa setempat, ada juga tuduhan bahwa kelompok agama ini *mengeksklusifkan* diri dari lingkungan sekitar. Secara bertahap pengurus mulai menginisiasi warga masyarakat melalui materi-materi pengajian yang berisikan *maklumat* dan keutamaan bersedekah, kewajiban membantu sesama yang membutuhkan dan manfaat menabung. Lambat laun mulai ada respon dan mulai terkumpul gabah yang diperoleh dengan mendatangi dari rumah ke rumah, hingga saat kondisi sekarang dimana para warga dengan kesadaran sendiri menyerahkan hasil panennya kepada pengurus lumbung yang juga dikelola secara simpan pinjam.

Implementasi Program mapan di Desa Jambakan kedepan perlu adanya proses belajar tentang pengalaman dari berbagai pihak agar pengelolaan dana bergulir berjalan dengan baik dan berlangsung terus perlu pengawasan petugas. Pengelolaan keuangan dana Mapan di Desa Jambakan belum melalui LKD, karena kelembagaan ini belum berfungsi serta tidak adanya kontrol dari tim pangan desa. Kedua hal ini terjadi karena imbas dari model perekrutan orang-orang yang berada didalamnya, selain juga karena faktor pergantian kepala desa yang menyisakan konflik antar personal serta kenyataan pahit yang harus diterima bahwa kepala desa yang baru tidak seperti yang diharapkan tetapi justru terlibat masalah hukum terkait dugaan penyelewengan dana desa. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya dana terkawal dengan aman. Hanya saja ada satu kelompok yang sudah menggulirkan sendiri kepada anggota baru tanpa melalui LKD namun sayangnya hal ini dianggap menyalahi aturan. Ada kelompok yang menganggap aturan tentang *kewajiban* menggulirkan dana mapan sama seperti program pemerintah yang apabila macet dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga tidak serius mengelolanya. Hasil penelitian berkaitan dengan proses memberdayakan masyarakat desa rawan pangan yang berbasis pada kondisi yang ada di Desa Jambakan ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model pemberdayaan petani Desa Jambakan-Kecamatan Bayat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program Mapan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan di pedesaan. Faktor kepentingan berbagai aktor berpengaruh negatif terhadap efektivitas pencapaian tujuan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal belum menunjukkan keberhasilan sesuai yang direncanakan, karena tidak disertai adanya proses mentransformasikan keorganisasian usaha ekonomi setempat, program Mapan masih bersifat sektoral, dan belum terlihat adanya keberpihakan politik yang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan rawan pangan

Saran

Program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal perlu diletakkan dalam perspektif transformasi keorganisasian usaha ekonomi setempat. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal perlu dilakukan secara terintegrasi antar sektor. Dalam rangka lebih mengefektifkan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal perlu disertai langkah-langkah berikut : 1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM kelompok miskin dan

rawan pangan di pedesaan, 2. Pengembangan keorganisasian usaha ekonomi setempat, 3. Pengembangan model permodalan usaha untuk penguatan ekonomi rumah tangga miskin dan peningkatan infrastuktur pedesaan .

Dalam Program pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan program dengan kebutuhan lokal dan lebih mengawal proses pengembangan kelembagaan itu sendiri supaya terbuka akses terutama bagi lapisan rumah tangga petani miskin. Terkait dengan keberlanjutan program Mapan, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal berikut : 1. Perekrutan Pendamping terutama yang kompeten secara teknis terkait kegiatan program, 2. Kontrol dalam pembentukan kelompok afinitas supaya tidak didominasi elit desa dan mengawal perkembangan kelembagaan (TPD dan LKD) dengan fasilitas pelatihan, insentif maupun pada saat pembentukannya

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009*. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta
- Israel A. 1990. *Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-Proyek Dunia*. LP3ES. Jakarta
- Pranadji T. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Membangun Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Badan Litbang dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Pranarka AMW dan Vidhyandika M. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) didalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Disunting oleh Onny S. Projono dan AMW Pranarka. CSIS. Jakarta
- Sumarti T dkk. 2008. *Model Pemberdayaan Petani dalam Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera (Kajian Kebijakan dan Sosial Ekonomi tentang ketahanan Pangan pada Komunitas Desa Rawan Pangan di Jawa)*. LPPM IPB dan Pusat Studi Ekonomi Departemen Pertanian

